PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah dengan potensi peternakan ruminansia yang cukup besar di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar tahun 2025, populasi ternak ruminansia terdiri atas sapi potong sebanyak 142.138 ekor, sapi perah 21.803 ekor, kambing 386.607 ekor, dan domba 19.655 ekor. Besarnya populasi tersebut menjadikan sektor peternakan sebagai salah satu penopang utama perekonomian masyarakat.

Namun demikian, sektor peternakan ruminansia memiliki kerentanan tinggi terhadap serangan penyakit menular, salah satunya adalah Penyakit Mulut dan Kuku. Penyakit Mulut dan Kuku merupakan penyakit infeksius akut pada hewan berkuku belah yang disebabkan oleh virus RNA anggota genus *Aphthovirus* dalam famili *Picornaviridae*, dengan kemampuan penularan yang sangat cepat serta menyebabkan morbiditas tinggi pada ternak. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya berupa penurunan produktivitas ternak, tetapi juga kerugian ekonomi yang signifikan bagi peternak. Kasus PMK kembali muncul di Indonesia pada tahun 2022 setelah lebih dari tiga dekade dinyatakan bebas, dan hingga tahun 2025 masih ditemukan kasus di beberapa wilayah, termasuk Kabupaten Blitar. Berdasarkan data Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar (2025), tercatat 112 kasus PMK pada awal tahun 2025 yang tersebar di beberapa kecamatan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian PMK masih menjadi tantangan yang perlu ditangani secara serius.

Dalam upaya pengendalian dan penanggulangan PMK, petugas kesehatan hewan memiliki peran strategis sebagai pelaksana utama di lapangan, mulai dari kegiatan vaksinasi, surveilans, edukasi, hingga penanganan kasus. Namun dalam implementasinya, berbagai kendala masih dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, serta rendahnya kesadaran peternak. Berdasarkan permasalahan tersebut, diperlukan suatu kajian yang mampu menggambarkan secara objektif mengenai peran serta

kendala yang dihadapi oleh petugas kesehatan hewan dalam penanganan PMK. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran dan kendala petugas kesehatan hewan dalam implementasi strategi pencegahan dan penanganan PMK di Kabupaten Blitar.

1.2 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana peran petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam implementasi strategi pencegahan serta penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Blitar.
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam implementasi strategi pencegahan serta penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Blitar.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Menganalisis peran petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam implementasi strategi pencegahan serta penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Blitar.
2. Mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh petugas kesehatan hewan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam implementasi strategi pencegahan serta penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) di Kabupaten Blitar.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu :

1. Manfaat teoritis yaitu diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang peternakan dan kesehatan hewan, khususnya terkait peran dan kendala petugas kesehatan hewan dalam pencegahan dan penanganan Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
2. Manfaat praktis yaitu diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar dalam meningkatkan

efektivitas dan optimalisasi peran petugas kesehatan hewan dalam pelaksanaan strategi pencegahan dan penanganan PMK di lapangan.

1.5 Kerangka Pikir

Penyakit mulut dan kuku merupakan penyakit hewan menular yang disebabkan oleh virus RNA dari genus *Aphthovirus* yang memiliki tingkat penularan tinggi dan berdampak signifikan terhadap kesehatan serta produktivitas ternak. Tingginya tingkat morbiditas akibat penyakit ini berimplikasi pada kerugian ekonomi, khususnya pada sektor peternakan ruminansia di Kabupaten Blitar. Dalam upaya pengendalian dan penanggulangan PMK, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Blitar melalui petugas kesehatan hewan memiliki peran penting sebagai pelaksana utama di lapangan. Peran tersebut meliputi kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pelaksanaan vaksinasi, pengawasan lalu lintas ternak, serta penanganan kasus secara langsung.

Namun, dalam pelaksanaannya, peran tersebut tidak terlepas dari berbagai kendala, baik yang bersifat internal maupun eksternal, seperti keterbatasan sumber daya, kondisi geografis, serta tingkat kesadaran peternak. Kendala–kendala tersebut diduga mempengaruhi optimalisasi pelaksanaan strategi pencegahan dan penanganan PMK.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berfokus pada dua aspek utama, yaitu peran petugas kesehatan hewan dan kendala yang dihadapi dalam implementasi strategi pencegahan dan penanganan PMK. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif sebagai bahan evaluasi dan masukan bagi pemangku kebijakan dalam meningkatkan efektivitas penanganan PMK di Kabupaten Blitar.